



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M.T. Haryono No. 2, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317, Website : www.inspektorat@jambiprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PROVINSI : JAMBI
NOMOR : LAP.700/ /ITPROV-2/IX/2021
TANGGAL : SEPTEMBER 2021 M
MUHARRAM 1441 H
TENTANG : HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN : 2020

BAB. I PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/388/SPT/ITPROV-1.1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.

2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja OPD, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada masing – masing OPD. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong OPD untuk konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) sesuai dengan RPJMD dan Renstra masing – masing instansi.

3. Tujuan Evaluasi SAKIP

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD bertujuan untuk :

- Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP.
- Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

4. Jangka Waktu Evaluasi SAKIP

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD di Jajaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 05 s.d 16 April 2021.

5. Ruang Lingkup Evaluasi

- Ruang lingkup Evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program, dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup :

- Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistim pengukuran kinerja;
- Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- Evaluasi terhadap program dan kegiatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

- Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Yang selanjutnya diberikan " kategori peringkat" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

- Nilai yang dihasilkan dari hasil evaluasi merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil tersebut menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam Lembar

WPJ	PT	KT

Kerja Evaluasi (LKE), yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi.

6. Metodologi Evaluasi

Metode adalah suatu cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Metode yang dipakai dalam evaluasi kinerja OPD adalah metode criteria referenced test yang merupakan evaluasi atas penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKj OPD, evaluasi atas sistim akuntabilitas dan evaluasi kinerja instansi dari kebijakan, program dan kegiatannya dan penilaian secara keseluruhan dengan kriteria masing-masing komponen yang telah ditetapkan yaitu kriteria evaluasi yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kinerja Instansi pemerintah.

7. Simpulan Hasil Evaluasi SAKIP

Dari hasil evaluasi SAKIP pada 43 (empat puluh tiga) OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 dengan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang dievaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

- | | |
|---|-------|
| a. OPD yang memperoleh hasil Evaluasi A (memuaskan) sebanyak : | 3 |
| b. OPD yang memperoleh hasil Evaluasi BB (sangat baik) sebanyak : | 11 |
| c. OPD yang memperoleh hasil Evaluasi B (baik) sebanyak : | 26 |
| d. OPD yang memperoleh hasil Evaluasi CC (cukup) sebanyak : | 3 |
| | <hr/> |
| | 43 |

Belum ada OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi yang memperoleh hasil Evaluasi dengan kategori "AA" (sangat memuaskan), namun demikian tidak adalagi OPD yang memperoleh nilai Evaluasi dengan kategori "C" (kurang).

8. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pencapaian Sasaran Tim Evaluasi Laporan Kinerja secara garis besarnya dapat menyarankan kepada Kepala OPD agar :

- 1) Tujuan dan sasaran Renstra berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja outcome yang terukur, terdapat keterkaitan antara program dengan tujuan/ sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, sasaran Renstra dijadikan sasaran rencana kinerja tahunan dan direviu secara berkala.
- 2) Dokumen Rencana Kinerja dilengkapi dengan indikator kinerja outcome yang terukur, terdapat keterkaitan antara program dengan sasaran yang ingin dicapai dan dipergunakan sebagai dasar menyusun anggaran.
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja (PK) selaras dengan RPJMD/Renstra dan dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.
- 4) Menyelaraskan antara dokumen RPJMD, Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja.
- 5) Membuat pedoman pengumpulan data kinerja agar data kinerja dapat diandalkan.
- 6) Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja dengan mencantumkan target secara periodik atas kinerja, mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja. kemudian rencana aksi tersebut dimonitor pencapaiannya secara berkala, dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- 7) Laporan Kinerja yang berisikan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran perlu penyempurnaan antara lain ;
 - a) Menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome.
 - b) Menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
 - c) Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, dan antara pencapaian tahun ini dengan capaian tahun sebelumnya, serta antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sampai dengan tahun ini.

- d) Menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja dan terdapat mekanisme verifikasi data internal dan laporan kinerja disusun dari hasil pengukuran kinerja.
- e) Informasi yang disajikan pada laporan kinerja digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta untuk peningkatan kinerja.
- 8) Mempublikasikan rencana strategis, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan laporan kinerja.

BAB. II. HASIL EVALUASI

1. Evaluasi Laporan Kinerja dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap tiga variabel yaitu : komponen, sub-komponen dan kriteria. Setiap komponen yang dievaluasi memiliki pembobotan tersendiri yaitu :

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	b. Rencana Strategis (10%), meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) c. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark/ kinerja lainnya) (5%)

2. Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 yang dilaksanakan pada 43 (empat puluh tiga) OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI	TOTAL NILAI	PREDIKAT
1	Dinas Kesehatan	24,88	22,19	12,12	7,56	14,97	81,72	A
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	26,04	20,63	12,31	6,85	15,46	81,30	A
3	Inspektorat Daerah	27,88	20,31	12,12	6,85	13,34	80,51	A
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26,20	20,00	12,31	6,20	15,00	79,71	BB
5	Dinas Kehutanan	23,17	19,69	12,31	8,02	16,46	79,65	BB
6	Badan Kepegawaian Daerah	24,60	19,38	12,28	5,58	15,78	77,62	BB
7	Biro Perekonomian dan SDA	24,13	18,13	12,31	6,85	16,14	77,57	BB
8	Biro Organisasi	27,25	17,50	12,31	6,48	14,22	77,76	BB
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	25,39	18,44	11,68	5,85	16,15	77,50	BB
10	Badan Kesbangpol	27,47	15,94	13,83	3,88	15,63	76,74	BB
11	Badan Keuangan Daerah	23,83	18,13	11,22	7,43	14,50	75,11	BB
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	28,78	13,44	10,42	6,85	12,18	71,67	BB
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25,88	14,06	10,43	5,29	15,38	71,04	BB
14	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	22,85	15,94	11,38	6,64	13,38	70,18	BB
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23,07	14,38	10,42	6,85	14,85	69,57	B

WPJ	PT	KT

16	Dinas Lingkungan Hidup	24,73	23,75	10,42	6,85	3,50	69,25	B
17	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	21,97	15,63	11,56	6,20	12,75	68,11	B
18	RSUD Raden Mattaher	24,20	12,81	10,19	6,85	13,91	67,96	B
19	Rumah Sakit Jiwa	21,51	17,81	10,15	3,87	14,13	67,47	B
20	Dinas Perhubungan	25,99	15,00	10,15	6,20	10,00	67,34	B
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23,41	12,81	10,42	5,79	14,58	67,02	B
22	Dinas Koperasi dan UMKM	24,20	16,25	10,07	5,12	11,21	66,84	B
23	Biro Pemerintahan	23,85	15,63	10,42	4,25	12,25	66,39	B
24	Biro Humas dan Protokol	25,74	13,13	10,42	4,83	12,24	66,35	B
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22,98	14,38	10,07	5,08	13,61	66,10	B
26	Biro Hukum	24,20	15,00	10,42	6,20	10,25	66,07	B
27	Badan Penghubung	22,41	15,00	10,15	5,12	12,88	65,56	B
28	Dinas Pendidikan	24,14	15,63	10,42	5,50	9,66	65,34	B
29	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	25,42	15,63	10,52	5,62	8,02	65,20	B
30	Dinas Ketahanan pangan	23,51	13,13	10,21	4,71	13,54	65,09	B
31	Biro Umum	24,21	13,44	10,42	5,62	11,13	64,81	B
32	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	21,30	15,31	9,94	4,42	12,50	63,47	B
33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	23,36	16,25	9,62	4,50	9,52	63,24	B
34	Dinas Komunikasi dan Informatika	22,20	12,50	10,42	4,50	13,57	63,18	B
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23,51	11,88	10,23	6,48	10,56	62,65	B
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23,01	14,38	8,09	4,50	11,73	61,71	B
37	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23,98	14,06	9,96	2,33	11,00	61,32	B
38	Sekretariat DPRD	23,95	13,44	10,15	5,83	7,81	60,64	B
39	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	17,67	14,38	9,04	3,88	14,82	60,14	B
40	Dinas Perkebunan	22,78	15,31	7,91	2,21	11,88	60,08	B
41	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	22,12	14,38	7,73	3,29	11,25	58,75	CC
42	Biro Kesramas	19,62	10,63	10,61	5,29	9,84	55,98	CC
43	Biro Pembangunan dan Kerjasama	20,03	15,94	5,75	3,84	5,21	50,76	CC

3. Terhadap hasil evaluasi tersebut di atas, terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1) DINAS KESEHATAN

a. Perencanaan Kinerja

Pemenuhan dokumen Renstra cukup memadai, karena Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Renstra Tahun 2016-2021, namun belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang baik. Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA. Telah dilakukan rewiu secara berkala atas dokumen Renstra OPD walaupun perbaikannya belum terlihat signifikan. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai. Dokumen rencana kinerja yang dibuat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah memenuhi kualitas dokumen rencana kinerja yang memadai. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

b. Pengukuran Kinerja

Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pengukuran Kinerja telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja dan kualitas pengukuran kinerja telah memadai. Implementasi pengukuran kinerja yang dibuat juga cukup memadai karena dalam implementasinya telah memenuhi indikator-indikator yang baik.

c. Pelaporan Kinerja

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Penyajian Informasi Kinerja tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja, namun demikian belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Pemanfaatan informasi

WPJ	PT	KT